

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Berdasarkan definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indikator ketenagakerjaan, pengangguran merujuk pada penduduk yang sedang tidak bekerja namun tengah mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tetapi belum memulai aktivitas kerja. Sukirno (1994) juga memberikan definisi serupa, di mana pengangguran adalah kondisi di mana seseorang dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil melakukannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak dianggap sebagai pengangguran.

Faktor utama yang menjadi penyebab pengangguran adalah kurangnya pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh jika ada permintaan yang cukup besar. Permintaan yang tinggi akan mendorong peningkatan produksi, yang pada gilirannya akan menambah kebutuhan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, ketersediaan lapangan pekerjaan berkaitan erat dengan tingkat permintaan di masyarakat.

Pengangguran bukan hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga menjadi masalah makroekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan manusia.

Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan penurunan standar kehidupan bagi kebanyakan orang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran sering menjadi fokus pembicaraan dalam debat politik, di mana para politisi berupaya menawarkan kebijakan yang diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan (Mankiw, 2000).

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan

1. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
 - a) Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 - b) Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu kurang dari 35 jam.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran

1. Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok (Sukirno, 1994):

a) Pengangguran Normal atau Friksional

Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

b) Pengangguran Siklikal

Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga

komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

c) Pengangguran Struktural

Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

d) Pengangguran Teknologi

Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan

perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi menjadi empat kelompok (Sukirno, 1994):

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran muncul akibat ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan pertambahan tenaga kerja. Dalam konteks ini, ekonomi mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai. Dampak dari situasi ini, dalam jangka waktu yang signifikan, menyebabkan sebagian besar tenaga kerja menjadi tidak aktif dalam dunia pekerjaan. Mereka mengalami pengangguran secara nyata dan hanya dapat memperoleh pekerjaan secara paruh waktu, sehingga dikenal sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat juga muncul sebagai konsekuensi dari penurunan aktivitas ekonomi, kemajuan teknologi yang mengurangi permintaan tenaga kerja, atau dampak kemunduran perkembangan suatu industri.

b) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Pada negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c) Pengangguran Musiman

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Disamping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d) Setengah Menganggur

Pada negara-negara berkembang migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.1.3 Akibat Buruknya Pengangguran

Dampak negatif dari pengangguran dapat dibagi menjadi dua aspek, seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2000):

a. Akibat buruk terhadap kegiatan perekonomian

Tingkat pengangguran yang tinggi menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dampak negatif dari masalah pengangguran memiliki konsekuensi ekonomi yang merugikan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kondisi pengangguran menghambat pencapaian tingkat kemakmuran yang dapat dicapai oleh masyarakat.
2. Dampak pengangguran mengakibatkan penurunan pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah.

3. Pengangguran berasal dari tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, dan dalam kondisi ekonomi rendah, pendapatan pajak pemerintah semakin berkurang.
4. Kehadiran pengangguran tidak mendukung pertumbuhan ekonomi.
5. Pengangguran membawa dua dampak negatif pada kegiatan sektor swasta.

Dalam hal pengangguran tenaga kerja, juga terjadi kelebihan kapasitas pada mesin-mesin perusahaan.

Pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas perusahaan dan rendahnya keuntungan, juga mengakibatkan berkurangnya motivasi untuk melakukan investasi.

b. Akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat

Pengangguran akan berdampak pada kehidupan personal dan stabilitas sosial dalam komunitas. Beberapa dampak negatif sosial yang timbul akibat pengangguran adalah:

1. Pengangguran mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan.
2. Pengangguran dapat mengakibatkan hilangnya keterampilan. Keterampilan hanya dapat dipertahankan melalui penggunaan praktis dalam bekerja.
3. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam aspek sosial dan politik. Penurunan aktivitas ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

2.1.2 Tingkat kemiskinan

Menurut (Todaro, 2004) “Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan, kemiskinan seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, tetapi secara statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dalam lingkaran kemiskinan. Banyak tokoh, peneliti, badan resmi pemerintah, yang memiliki pendapat tersendiri dalam memandang masalah kemiskinan ini.”

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Terdapat beberapa definisi dan konsep tentang kemiskinan, salah satunya adalah konsep kemiskinan absolut yang dikemukakan oleh Todaro (2004). Konsep ini merujuk pada jumlah penduduk yang tidak mampu memperoleh sumber daya yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat alamiah atau kultural, serta faktor-faktor yang bersifat non alamiah atau struktural.

Hall, Anthony, & Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak atau mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat.

Pendekatan absolut menekankan pemenuhan kebutuhan fisik minimum untuk menjalani hidup yang layak, sementara pendekatan relatif menentukan kemiskinan berdasarkan taraf hidup relatif dalam masyarakat (Parsudi, 2004).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach) digunakan untuk mengukur kemiskinan. BPS mempertimbangkan jumlah rupiah yang dikeluarkan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Kebutuhan minimum makanan ditentukan dengan standar 2.100 kalori per hari, sementara kebutuhan non-makanan mencakup perumahan, sandang, serta barang dan jasa lainnya.

Kriteria kemiskinan dibedakan berdasarkan wilayah, yakni perkotaan dan pedesaan. BPS menyebutkan ada 14 kriteria yang menandakan bahwa suatu keluarga atau rumah tangga dikategorikan sebagai miskin.

1. Bangunan tempat tinggal memiliki luas lantai kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal menggunakan bambu, rumbia, atau kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau berbagi dengan rumah tangga lain.

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Konsumsi daging, susu, atau ayam hanya dilakukan satu kali dalam seminggu.
9. Pembelian satu set pakaian baru hanya dilakukan sekali dalam setahun.
10. Makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.
11. Tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga berasal dari petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000,00 per bulan (2005), atau pendapatan per kapita Rp 166.697,00 per bulan (2007).
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah, tidak tamat SD, atau hanya tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang dapat dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00, seperti sepeda motor (kredit atau non-kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut (Sugiyono, 2005), penentuan kemiskinan dilakukan berdasarkan total pengeluaran rumah tangga yang juga melibatkan jumlah konsumsi beras per orang per tahun, dengan pembagian antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

1. Daerah Pedesaan :
 - a. Dikategorikan sebagai miskin jika pengeluaran keluarga kurang dari 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - b. Tergolong sebagai miskin sekali apabila pengeluaran keluarga kurang dari 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - c. Dianggap sebagai yang paling miskin bila pengeluaran keluarga kurang dari 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Daerah Perkotaan :
 - a. Termasuk dalam kategori miskin jika pengeluaran keluarga kurang dari 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - b. Dinyatakan sebagai miskin sekali apabila pengeluaran keluarga kurang dari 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 - c. Dianggap sebagai yang paling miskin jika pengeluaran keluarga kurang dari 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Penetapan garis kemiskinan ini, yang setara dengan nilai beras, bertujuan untuk membandingkan tingkat hidup antar waktu dan perbedaan harga kebutuhan pokok antar wilayah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan.

2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Rasa aman dari perlakuan atau aman tindak kekerasan.
 - a. Hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2004).

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan atau BKKBN adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. (World Bank, 2001) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari.

2.1.2.1 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan cara pandang kebutuhan dasar, BPS (2007: 54-55) menggunakan tiga penunjuk kemiskinan, yakni 1. Head Count Index, yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. 2. Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan) yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 3. Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan) yang memberikan gambaran mengenai sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurut (Mudrajad, 2006), dari ketiga pendekatan tersebut, cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan Head Count Index.

Selain itu, dalam mengukur tingkat kemiskinan, BPS menerapkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Patokan untuk kebutuhan minimum makanan adalah 2.100 kalori per orang per hari, sementara untuk kebutuhan minimum non-makanan mencakup pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta berbagai barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

Umumnya, terdapat dua indikator utama untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu daerah. Menurut Nurkse, indikator kemiskinan yang umum digunakan dapat dibagi menjadi dua, seperti yang dijelaskan oleh (Arsyad, 1997):

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang dikategorikan sebagai golongan miskin absolut ketika pendapatan yang diperolehnya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini bertujuan untuk menetapkan tingkat pendapatan minimum yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup.

Tantangan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menetapkan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum, karena kedua faktor tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan variabel ekonomi lainnya.

Meskipun demikian, untuk mencapai standar hidup yang layak, seseorang membutuhkan barang dan jasa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang dianggap sebagai bagian dari golongan miskin relatif jika ia dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun tingkatnya masih lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Konsep ini membuat garis kemiskinan menjadi dinamis, mengalami perubahan seiring perubahan tingkat hidup masyarakat.

Menurut (Mudrajad, 2006), ukuran kemiskinan didasarkan pada jumlah pengeluaran rumah tangga dalam rupiah, yang disesuaikan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Seseorang dianggap miskin jika konsumsi per kapitanya setara dengan 20 kg beras untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Namun, ukuran kemiskinan Mudrajad mendapat banyak kritik karena hanya bergantung pada satu harga (harga beras), dan karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, harganya dapat menurun dengan cepat untuk keluarga miskin.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kemiskinan dan Ciri-ciri Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut Arsyad, (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan di bagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi kemiskinan yang diukur dari

tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi fasilitas umum dan kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan.

2. Kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang terkait dengan distribusi pendapatan, memperhatikan ketidakmerataan pendapatan dalam lingkungan sekitar atau masih rendahnya pendapatan dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya.

Menurut Sony Harry. (2007) dalam Nurwati. (2008) Kemiskinan dapat di bedakan menjadi dua yaitu kemiskinan bersifat kronis, dan kemiskinan bersifat sementara.

1. Kemiskinan kronis merujuk pada kondisi kemiskinan yang terkait dengan lingkungan alam, infrastruktur yang sangat sulit diakses untuk kegiatan perekonomian. Biasanya terdapat di daerah terpencil, sulit untuk melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi, dan cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
2. Kemiskinan sementara adalah jenis kemiskinan yang bersifat temporer atau bersifat sementara, di mana kondisi kehidupan dapat mengalami perubahan menjadi lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Contohnya, saat masyarakat mengalami bencana alam, mereka mungkin mengalami kemiskinan pada saat itu, namun setelah bencana, kehidupan mereka dapat pulih kembali ke keadaan normal.

Menurut Suryawati, (2005) kemiskinan dapat di lihat dari ciri-ciri

kelompok penduduk sebagai berikut :

1. Memiliki tingkat pendidikan yang terbatas.
2. Mayoritas berusaha mandiri atau bekerja dalam sektor informal dengan skala yang kecil.
3. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah, keterampilan, dan peralatan untuk bekerja.
4. Keterbatasan dalam mengakses fasilitas umum.

2.1.2.3 Penyebab Kemiskinan

Sementara itu menurut (Sharp, 1996) dan (Mudrajad, 2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Pada tingkat mikro, kemiskinan timbul karena ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Individu miskin hanya memiliki sumber daya terbatas dengan kualitas yang rendah.
2. Kemiskinan muncul karena perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas rendah dalam sumber daya manusia dapat mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang pada gilirannya menyebabkan pendapatan yang minim. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah termasuk kurangnya pendidikan, ketidakberuntungan dalam nasib, adanya diskriminasi, atau karena faktor keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab kemiskinan ini berakar pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) yang ditemukan oleh Ragnar Nurkse. Teori ini menyatakan bahwa "negara miskin itu miskin karena dia miskin." Keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi pemicu rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah berdampak pada pendapatan yang minim. Pendapatan yang rendah selanjutnya mengakibatkan tabungan dan investasi yang minim. Kondisi investasi yang rendah berkontribusi pada keterbelakangan, dan seterusnya, menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk dihentikan.

Berdasarkan (Kuncoro, 2006), kemiskinan pada tingkat mikro muncul akibat ketidaksamaan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Selain itu, kemiskinan juga timbul karena perbedaan dalam sumber daya manusia. Kualitas rendah dari sumber daya manusia berdampak pada produktivitas yang rendah, sehingga upahnya juga rendah. (Setyawan, 2001) menambahkan bahwa kemiskinan di negara sedang berkembang dapat disebabkan oleh faktor ketidakberuntungan, yang merupakan bagian dari pendekatan kemiskinan terpadu.

2.1.2.4 Indikator Kemiskinan dan Ukuran kemiskinan

Dengan merujuk pada pendekatan kebutuhan dasar, BPS (2007: 54-55) menggunakan tiga metrik untuk mengukur kemiskinan. Pertama, Head Count Index, yang merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kedua, Poverty Gap Index (Indeks Kedalaman Kemiskinan),

yang mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran antara masing-masing penduduk miskin dan garis kemiskinan. Ketiga, Poverty Severity Index (Indeks Keparahan Kemiskinan), memberikan gambaran tentang sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Mudrajad (2006) menyimpulkan bahwa metode paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan menggunakan Head Count Index.

Menurut Sayogyo (dalam Suwadi 2014:27) menjelaskan tentang teori dari lincolin arsyad kemiskinan dapat di lihat atau di ukur dari:

1. Indikator Tingkat Konsumsi Beras mengukur jumlah konsumsi beras per kapita per tahun, dengan mengelompokkan dalam tiga kategori miskin, yaitu sangat miskin, miskin, dan nyaris miskin.
2. Indikator Tingkat Pendapatan dalam pengukuran pendapatan melibatkan pendapatan per kapita. Pengukuran ini dapat menggunakan Garis Kemiskinan, di mana jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan pengeluaran harian di bawah satu dolar Amerika. Jika ukurannya dua dolar per hari, maka termasuk dalam kategori miskin.
3. Kemiskinan relatif adalah kondisi di mana tingkat kemiskinan terkait dengan distribusi pendapatan, memperhatikan ketidakmerataan dengan masyarakat di sekitarnya. Atau dengan kata lain, pendapatan masih rendah jika dibandingkan dengan lingkungan sekitar.

Menurut Sony Harry (2007) seperti yang dikutip oleh Nurwati (2008), ada dua jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara.

1. Kemiskinan kronis merujuk pada keadaan di mana kondisi alam dan

infrastruktur sulit diakses secara ekonomi, terutama di daerah terpencil, yang menyulitkan pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk kelangsungan hidup. Keadaan ini cenderung berlanjut dalam jangka waktu yang panjang.

2. Kemiskinan sementara menggambarkan situasi di mana kehidupan masyarakat mengalami keterpurukan untuk sementara waktu, seperti akibat bencana alam. Meskipun pada periode tertentu mereka mengalami kemiskinan, setelah melewati masa sulit tersebut, kehidupan mereka dapat pulih kembali ke kondisi normal.
3. Kemiskinan relatif terkait dengan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara masyarakat dalam lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, pendapatan individu atau keluarga masih di bawah rata-rata lingkungan sekitar mereka.

Menurut Sony Harry. (2007) dalam Nurwati. (2008) Kemiskinan dapat di bedakan menjadi dua yaitu kemiskinan bersifat kronis, dan kemiskinan bersifat sementara.

Kemiskinan kronis merujuk pada kemiskinan yang terkait dengan kondisi alam dan infrastruktur yang sulit diakses secara ekonomi, khususnya di daerah terpencil, di mana kegiatan ekonomi sulit dilaksanakan untuk kelangsungan hidup. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Kemiskinan sementara menggambarkan situasi di mana kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan untuk sementara waktu,

seperti akibat dari bencana alam. Meskipun pada periode tertentu mereka mengalami kemiskinan, setelah melewati masa sulit tersebut, kehidupan mereka dapat pulih kembali ke kondisi normal.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam berbagai aspek, terutama dalam ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan tiga dimensi dasar yang membentuk pembangunan manusia adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan, dan memiliki kehidupan yang layak. Ketiga dimensi ini direpresentasikan oleh indikator-indikator seperti angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Semua indikator ini dijadikan satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

IPM juga berfungsi sebagai indikator tidak langsung untuk mengevaluasi keberhasilan pelayanan yang diberikan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Kesuksesan suatu daerah dalam pembangunan manusianya dapat diukur dengan fokus pada usaha mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan peningkatan IPM. Peningkatan IPM mencerminkan peningkatan dalam satu atau lebih komponen IPM, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Tujuannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat mengakses pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang merupakan rata-rata dari indeks kesehatan, pengetahuan dan indeks pengeluaran/daya beli. Metode penghitungan IPM di Indonesia telah mengalami perubahan. Perubahan terjadi pada dimensi pengetahuan, perubahan proksi indikator daya beli dan agregasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator dalam dimensi pengetahuan yang sebelumnya digunakan yakni angka melek huruf diganti dengan angka harapan lama sekolah (*Expected Yearsof Schooling/EYS*) sedangkan rata-rata lama sekolah (*Means Yearsof Schooling/MYS*) tetap digunakan. Pergantian ini perlu karena angka melek huruf tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik dan karena angka melek huruf sebagian daerah sudah sangat tinggi. Sementara itu, dalam perhitungan indikator daya beli, metode baru menggunakan 96 komoditas sedangkan pada metode lama 27 komoditas. Pertimbangan perubahan adalah *share* komoditas metode lama terus mengalami penurunan. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada metode agregasi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Metode yang digunakan sebelumnya adalah rata-rata aritmatik diganti dengan dengan rata-rata geometrik sehingga capaian rendah pada suatu komponen tidak ditutupi oleh capaian yang tinggi pada komponen lain.

2..1.3.1 Status dan Pengukuran IPM

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yang bertujuan

untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X1+X2+X3)$$

Dimana: X1 : indek harapan hidup

X2 : indek pendidikan

X3 : indek paritas daya beli

Nilai indeks hasil perhitungan untuk setiap komponen berada dalam rentang antara 0 (representasi keadaan terburuk) dan 1 (representasi keadaan terbaik). Dalam laporan ini, nilai indeks tersebut diungkapkan dalam bentuk persentase (dikalikan 100) untuk memudahkan interpretasi. Setiap indeks komponen IPM mencerminkan perbandingan antara selisih nilai maksimum dan nilai minimum dari indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$indek X (i) = \frac{X(i) - X(i)min}{X(i)maks - X(i)min}$$

Dimana: $X(i)$: Indikator ke-i ($i = 1,2,3$)

$X(i) maks$: Nilai maksimum $X(i)$

$X(i) min$: Nilai minimum $X(i)$

1.1.3.1 Komponen yang Mempengaruhi IPM

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) sebagai tolok ukur kinerja pembangunan secara menyeluruh disusun dengan mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu umur panjang dan kesehatan, akses pengetahuan, dan taraf hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat tercermin dalam indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sementara dimensi taraf hidup yang layak diwakili oleh indikator kemampuan daya beli.

Angka harapan hidup merujuk pada estimasi jumlah tahun hidup individu dalam suatu wilayah. Melek huruf didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menerjemahkan, membuat, berkomunikasi, dan memproses isi teks tertulis.

Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui metode pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Mencapai kemajuan dalam pembangunan pendidikan tidaklah mudah. Salah satu hambatan dalam pembangunan pendidikan adalah rendahnya cakupan dan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, karena institusi pendidikan umumnya terpusat di pusat kota dan kecamatan. Kendala ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi. Selain itu, kemiskinan dan biaya pendidikan yang tinggi turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab banyaknya siswa yang drop out atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Taraf hidup yang layak merujuk pada kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang tersedia bagi seseorang, yang umumnya diukur melalui pendapatan riil per individu.

1.1.3.2 Manfaat IPM

Adapun manfaat indeks pembangunan manusia antara lain adalah:

1. IPM menjadi parameter kritis dalam mengevaluasi efektivitas upaya meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. IPM memiliki peran dalam menetapkan tingkatan atau tingkat kemajuan suatu daerah atau negara.
3. Bagi Indonesia, data IPM memiliki kepentingan strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai metrik kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi faktor penentu alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.4 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengangguran terbuka merujuk pada bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran diukur sebagai persentase pengangguran terhadap angkatan kerja dan memiliki dampak terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara teoritis, tingkat pengangguran berbanding terbalik dengan IPM, di mana pengangguran dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan kesejahteraan karena pengangguran dapat mengurangi IPM karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, penurunan tingkat pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berkontribusi pada peningkatan IPM.

IPM terdiri dari tiga komponen yang terkait dengan produktivitas masyarakat. Kesehatan dan pendidikan yang baik meningkatkan produktivitas, dan teori pertumbuhan baru menyoroti peran pemerintah dalam meningkatkan IPM. Investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memajukan pengetahuan dan keterampilan, dan meningkatkan produktivitas. Rendahnya produktivitas kaum miskin sering disebabkan oleh akses terbatas terhadap pendidikan.

Pembangunan manusia dianggap sebagai tujuan utama pembangunan, dan IPM memainkan peran kunci dalam menentukan kemampuan negara untuk menyerap teknologi modern dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

IPM, menurut Yani Mulyaningsih, memiliki tiga dimensi utama: hidup panjang, hidup sehat, dan pemenuhan kebutuhan standar hidup melalui pengetahuan dan akses sumber daya. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap pendapatan petani dan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Apriliyah S. Napitupulu menyatakan bahwa IPM berperan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Indeks ini menggabungkan indikator seperti angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan di sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan dapat

berkontribusi pada pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan di suatu daerah.

2.1.5 Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Ini merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan alat pemenuh kebutuhan dasar atau kesulitan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menjadi penyebab kemiskinan (Bappeda, 2011), sehingga tingkat kemiskinan dapat memengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sumber daya manusia menjadi faktor penentu arah pembangunan di suatu daerah, dan kualitas manusia menjadi kunci untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Pembangunan manusia menjadi fokus penting karena modal manusia berperan dalam menentukan kesejahteraan hidup dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, IPM seringkali terkait dengan kemiskinan (Napitupulu, 2007). Terkait dengan kesejahteraan, Kabupaten Nagekeo mengalami tingkat kemiskinan yang sedang hingga tinggi, meskipun mengalami penurunan tren selama periode 2010-2022. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tingkat kemiskinan memiliki dampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagekeo.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan pengamatan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Nagekeo. Oleh karena itu penelitian terdahulu ini menjadi referensi dalam melakukan penelitian sehingga dapat menambah pengetahuan yang digunakan dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, saya tidak menemukan penelitian dengan lokasi yang sama seperti lokasi penelitian yang dipilih oleh saya. Namun saya mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Alat analisis	Kesimpulannya
1.	(Nurcholis, 2014)	Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur	Regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran
2.	(Istifaiyah, 2015)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomidan Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila	Regresi linier berganda	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Ketika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka diharapkan

		Tahun 2009-2013)		memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran yang naik akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin begitu pula sebaliknya.
3.	(Setiawan, Deni, Hainim Kadir, 2014)	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau	Regresi linier berganda	Pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.
4.	(I Komang Agus Adi Putra, Sudarsana Arka, 2016)	Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kesempatan Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali	Regresi linier berganda	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali
5.	(M Amirul Muminim, Wahyu	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk	Regresi linier berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan pada

	Hidayat, 2015)	Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Timur		tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur
6.	Mahsunah (2011)	Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Regresi linier berganda	Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Negatif dan signifikan.

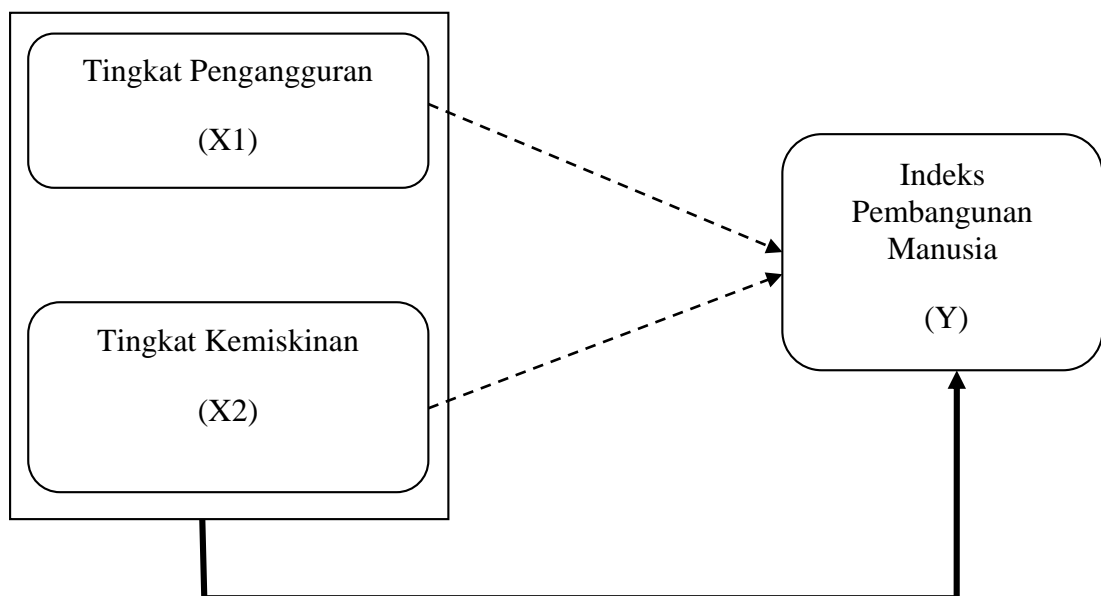
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dampak tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nagekeo. Salah satu strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia adalah melalui pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Menurut Sadono Sukirno (2004), konsekuensi negatif dari pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh individu. Penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pengangguran dapat meningkatkan risiko terjerumus ke dalam kemiskinan karena kekurangan pendapatan. Tingkat pengangguran yang tinggi dalam suatu negara dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menghambat prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Apriliyah S. Napitupulu (2007) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. IPM melibatkan indikator-indikator komposit seperti angka harapan hidup, tingkat melek huruf, dan konsumsi per kapita dalam perhitungannya. Peningkatan dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Parsial: - - - - ->

Simultan: —————>

2.4 Hipotesis

1. Secara parsial

- a. Apabila Tingkat pengangguran meningkat dapat mempengaruhi menurunnya indeks pembangunan manusia begitupun sebaliknya tingkat pengangguran menurun dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- b. Apabila Tingkat Kemiskinan meningkat dapat mempengaruhi meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia begitupun sebaliknya Tingkat Kemiskinan menurun dapat mempengaruhi menurunnya Indeks Pembangunan Manusia.

Ho : Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan secara masing-masing berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2022.

2. Secara simultan

Ha : Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010-2022.